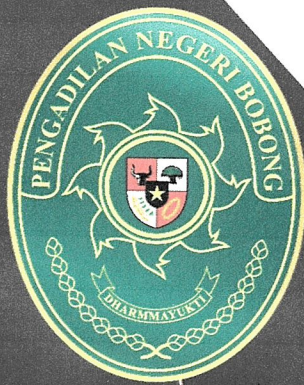




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayan
bangsa**

PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA
(PK)**

2026

Jalan Talo
Nomor 2,
Desa Wayo.
Kecamatan
Taliabu Barat,
Kabupaten
Pulau Taliabu
Provinsi
Maluku Utara
97794.
[www.pn-
bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id)



www.pn-bobong.go.id



pnbobong06@gmail.com



Pengadilan Negeri Bobong

REVISI

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tahun 2026

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara 97794
pnbobong06@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BOBONG



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bobong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Sutaji, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Selaku atas langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara


Sutaji, S.H., M.H.
NIP. 196302231988031001

Bobong, 6 Januari 2026
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bobong


Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn
NIP. 197701162002121004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.	100%
		1.2 Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	82%
		1.7 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	85%
		1.8 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	85%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu).	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,82
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80,1
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	97,2
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	93,4
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	77
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	77
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30

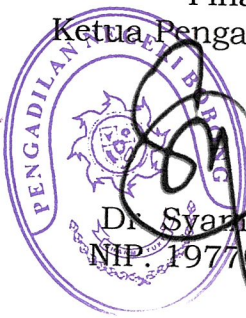
NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 85.137.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.352.331.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 44.500.000

Bobong, 06 Januari 2026

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara


Sutaji, S.H., M.H.
NIP. 196302231988031001

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bobong


Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn
NIP. 197701162002121004



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

PENGADILAN NEGERI BOBONG

PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

**REVISI KE - 1
PERJANJIAN KINERJA
(PK)**

Tahun 2026

Jalan Talo
Nomor 2,
Desa Wayo.
Kecamatan
Taliabu Barat.
Kabupaten
Pulau Taliabu
Provinsi
Maluku Utara
97794.
[www.pn-
bobong.go.id](http://www.pn-bobong.go.id)



www.pn-bobong.go.id



pnbobong06@gmail.com



Pengadilan Negeri Bobong

REVISI KE - 1

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tahun 2026

Pengadilan Negeri Bobong Kelas II



Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
Jalan Talo Nomor 2, Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara 97794
pnbobong06@gmail.com

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II**



**REVISI KE - 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta beroreantasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Syamsuni, S.H.,M.Kn.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bobong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Suwono, S.H.,S.E., M. Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Selaku atas langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

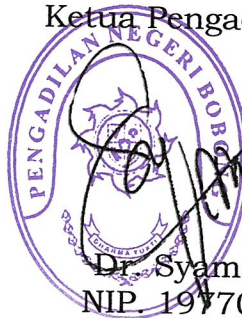
Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Suwono, S.H., S.E., M. Hum.
NIP. 196301011992121001

Bobong, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bobong



Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn
NIP. 197701162002121004

REVISI KE - 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

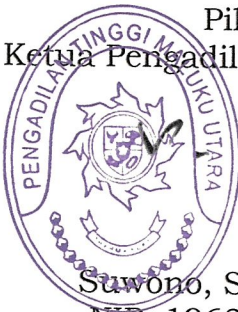
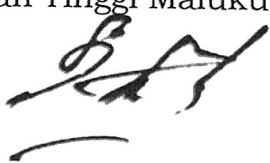
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.	100%
		1.2 Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		1.3 Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		1.4 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100%
		1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	82%
		1.7 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	85%
		1.8 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	20%
		1.9 Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	85%
		1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court	100%
		1.11 Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu).	100%
		1.12 Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,82
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80,1
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	97,2
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	93,4
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	77
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	77
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 85.137.000
2.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.352.331.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 44.500.000

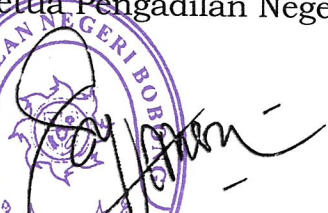
Bobong, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Suwono, S.H., S.E., M. Hum.
NIP. 196301011992121001

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bobong



Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.
NIP. 197701162002121004

